Format Usulan Program RAN OGI 2023-2024

INSTITUSI PENGUSUL: Indonesia Corruption Watch, Transparency International Indonesia	
KATEGORI USULAN: MELANJUTKAN	
USULAN PROGRAM	
Stakeholder Pelaksana	: 1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) 4. Komisi Informasi Provinsi 5. Komisi Informasi Pusat
Judul Komitmen	: Mendorong Keterbukaan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini	: Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan pelayanan publik bagi masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat maupun daerah mengalokasikan anggaran pengadaan barang dan jasa (PBJ) dengan jumlah yang berlimpah. Misalnya pada 2021, LKPP mencatat belanja pengadaan barang dan jasa mencapai Rp 1.214 triliun. Jumlah ini sekitar 52,1% dari total Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN). Sayang, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk PBJ juga rentan dikorupsi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesia Corruption Watch, sepanjang 2016 - 2021, setidaknya 40% kasus korupsi yang terjadi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, yang menyatakan bahwa 70% kasus korupsi terkait dengan pengadaan. Dalam kondisi pandemi COVID-19, potensi korupsi pengadaan menjadi lebih besar. Sebab informasi mengenai pengadaan barang dan jasa tidak terpublikasi dan sulit diakses oleh masyarakat. Meskipun pandemi mengharuskan adanya pengadaan yang cepat di tengah keadaan darurat, namun penting untuk tetap memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas.

	Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi potensi korupsi di pengadaan barang dan jasa adalah dengan membuka informasi pengadaan sebanyak-banyaknya. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi proses pengadaan. Di sisi lain, membuka informasi pengadaan barang dan jasa akan membuat pelaku usaha lebih memahami kebutuhan pemerintah dan bagaimana pelaku usaha dapat terlibat dalam pengadaan yang akan dilakukan. Hal ini tidak akan menimbulkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Merujuk pada pernyataan perwakilan KPPU dalam salah satu putusan Komisi Informasi Pusat, disebutkan bahwa, pertama, tidak ada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan secara eksplisit bahwa dokumen kontrak bersifat rahasia. Kedua, dokumen kontrak dapat membantu mengungkap potensi praktik persekongkolan tender. Ketiga, walaupun dokumen metode pelaksanaan sebuah proyek jatuh ke tangan perusahaan lain sementara perusahaan itu belum punya pengalaman menjalankan proyek sejenis maka dengan sendirinya pasti gugur sebagai peserta tender karena kualifikasi peserta tender adalah berpengalaman. Gagasan keterbukaan kontrak pengadaan barang/jasa ini merupakan kelanjutan dari RAN OGI periode 2021-2022, khususnya dalam hal peningkatan transparansi proses pengadaan yang menargetkan publikasi seluruh dokumen dalam bentuk data terbuka. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang merinci informasi dan dokumen PBJ yang bersifat terbuka untuk publik, maka standar yang baru ini perlu disosialisasikan dan diimplementasikan secara luas di semua Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah serta sistem pengadaan elektronik yang berlaku.
Apa bentuk komitmennya	: Kegiatan yang akan dilakukan terkait dengan rencana aksi ini, yaitu:

		1. Publikasi transaksi E-katalog di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah 2. Membuka lebih banyak Informasi pengadaan darurat di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah 3. Mendorong efektivitas kanal <i>complaint handling mechanism</i> pengadaan (e-pengaduan) dalam menangani pengaduan masyarakat 4. Mendorong pengembangan database Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang lebih terintegrasi dan terbuka 5. Mendorong pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah 6. Mendorong pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh publik 7. Mendorong sistem pengadaan elektronik yang mengakomodir keterbukaan informasi di pengadaan sesuai Perki 1/2021 tentang Standar Layanan Informasi Pengadaan (pasal 15 angka 9) 8. Memastikan implementasi Perki SLIP 1/2021 tentang Standar Informasi Publik
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik	:	Membuka informasi pengadaan akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi dan memberikan masukan kepada pemerintah atas pengadaan yang dilakukan. Selama ini, salah satu hambatan dalam pengawasan pengadaan publik adalah minimnya informasi yang dapat diakses melalui sistem pengadaan (baru tahapan perencanaan hingga penetapan pemenang) sementara permintaan informasi membutuhkan waktu yang lama. Dengan membuka informasi di sistem pengadaan maka hal ini akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi. Selain itu, informasi pengadaan juga akan mempermudah pelaku usaha untuk terlibat dalam pasar pengadaan pemerintah yang berujung pada proses pengadaan yang lebih kompetitif dan efisien, serta menghasilkan barang/jasa yang berkualitas. Lebih lanjut, Pemerintah, OMS, Akademisi, dan Jurnalis juga dapat memanfaatkan data tersebut untuk analisis lebih lanjut mengenai efektivitas dan potensi kecurangan dalam pengadaan.
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah	:	Komitmen ini sejalan dengan nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah yakni transparansi dan akuntabel. Adanya informasi terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa menunjukkan adanya transparansi kegiatan Pemerintah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang

		No 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, komitmen ini sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Perpres 16/ 2018, yaitu transparan, terbuka dan akuntabel.	
Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	:	Komitmen ini mendukung Kegiatan Prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yakni Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik khususnya Program Prioritas “Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah”. Selain itu, Komitmen ini juga sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) No.16 yakni "Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan", terutama pada Target 16.6: “Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat”, dan Target 16.10: “Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional”.	
Penerima Manfaat	:	Masyarakat, khususnya: 1. Organisasi masyarakat sipil 2. Akademisi 3. Pelaku Usaha 4. Inspektorat/ APIP 5. Jurnalis	
Informasi Tambahan	:	Selain berkaitan dengan pemenuhan RPJMN 2020-2024 dan SDGs, komitmen ini juga sejalan dengan agenda Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dalam Aksi 4 Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, Aksi 5 Implementasi epayment dan ekatalog, dan Aksi 9 Penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan program pemerintah. Lebih lanjut, komitmen ini juga bisa menjadi bagian dari implementasi komitmen G20 Anti Corruption Working Group 2022, yaitu isu prioritas mempromosikan partisipasi publik dan pendidikan anti korupsi.	
Sumber Dana Pengusul	:	-	
Indikator Capaian dengan Target Terukur		Waktu Mulai	Waktu Berakhir

(dapat diisi dengan target yang ingin dicapai)		(waktu dimulainya pelaksanaan ukuran keberhasilan)	
1. Publikasi transaksi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah di e-katalog		Januari 2023	Desember 2023
2. Informasi pengadaan darurat lebih jelas dan lebih banyak Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang mempublikasi: a. Kanal PBJ darurat minimal mencakup: pemenang berkontrak, spesifikasi barang yang dibeli, berapa jumlahnya, sumber dana b. Review Perlem PBJ Darurat c. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran yang meminta seluruh Pemda melengkapi informasi PBJ daruratnya		Januari 2023	Desember 2023
3. Mendorong efektivitas kanal complaint handling mechanism pengadaan (e-pengaduan) dalam menangani pengaduan masyarakat a. Pengembangan API terbuka b. Integrasi E-pengaduan ke Opentender.net c. Mengintegrasikan Inspektorat K/L/PD dalam sistem e-Pengaduan		Januari 2023	Desember 2024
4. Mendorong pengembangan database Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang terintegrasi dan		Januari 2023	Desember 2024

- terbuka a. data Beneficial Ownership b. data rekaman kinerja/ performa penyedia			
5. Mendorong pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah a. Pelatihan bagi UMKM mengenai peluang UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah b. Audit Sosial mengenai kemudahan UMKM terlibat dalam pengadaan pemerintah		Januari 2023	Desember 2024
6. Mendorong pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh publik: a. Training pengadaan barang dan jasa untuk CSO dan Jurnalis b. Penyusunan Modul Audit Sosial Pengadaan Barang dan Jasa bagi CSO c. Penyusunan modul Akademi Antikorupsi mengenai Pengawas Pengadaan Barang dan Jasa		Januari 2023	Desember 2024
7. Mendorong sistem pengadaan elektronik yang mengakomodir keterbukaan informasi di pengadaan sesuai Perki 1/2021 tentang Standar Layanan Informasi Pengadaan (pasal 15 angka 9), yaitu menyediakan dokumen/ informasi yang dapat diakses oleh publik.		Januari 2023	Desember 2024
8. Memastikan implementasi Perki SLIP 1/2021 tentang Standar Informasi Publik,		Januari 2023	Desember 2024

khususnya di pengadaan: a. Uji akses keterbukaan informasi di tingkat Provinsi b. Memasukkan poin keterbukaan pengadaan barang/jasa dalam MONEV Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan KIP			
Informasi Kontak			
Nama PIC dari K/L atau OMS Pengusul	:	Christian Evert Tuturoong Siti Juliantari Rachman Agus Sarwono	
Departemen / Jabatan	:	Indonesia Corruption Watch Transparansi Internasional Indonesia	
Email	:	kes@antikorupsi.org siti.juliantari@antikorupsi.org asarwono@ti.or.id	
Nomor Handphone	:	Kes 0857-7062-4088 Tari 0857-7062-4118 Agus Sarwono 0812-699-2667	